**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 (Studi Di Kantor DPPKAD Kabupaten Situbondo)**

Junikasih Sophia Watubun

*(Program Studi Akuntansi, FakultasEkonomika dan Bisnis niversitas Kanjuruhan, Malang)*

*e-mail:* *shofiewatubun@gmail.com*

Drs. Anwar Made, M.Si., Ak CA

Doni Wirshandono Yogivaria, SE, M.Ak, CA

*(Program Studi Akuntansi,, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UniversitasKanjuruhan, Malang)*

***ABSTRAK:*** *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Kabupaten Situbondo. Kemudian untuk mengetahui hal-hal apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan untuk mengetahui kendala-kendala apa yang timbul dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian interpretif, penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek pada Dinas Pendapan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Untuk kategori SDM dan Sistem Informasi adalah kategori cukup siap. Kendala dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah antara lain, sampai saat ini penyusunan LKPD masih dilakukan secara manual (excel) belum ada perangkat lunak khusus, jumlah SDM masih belum cukup, tidak adanya pendampingan khusus dari BPK karena keterbatasan sumber daya manusia.*

***Kata kunci -****Standar Akuntansi Pemerintahan, Basis Akrual, Penerapan.*

# **PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Reformasi keuangan Negara telah dimulai sejak Tahun 2003 ditandai dengan lahirnya paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu Undan-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. ketiga paket undang-undang ini mendasari pengelolaan keuangan Negara yang mengacu pada *international best practices.*Setelah Undang-Undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan.Reformasi pengelolaan keuangan Negara/Daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan Negara/Daerah.Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi Negara dalam mengubah pola administrasi keuangan *(financial administration)* menjadi pengelolaan keuangan Negara *(financial management).*

Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik *(good governance)*, Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabiltas pengelolaan keuangan Negara.Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan Akuntansi Pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam menyusunan dan penyajian laporan keuanagn pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu Komite Standar Independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kententuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat (1) tentang Keuangan Negara, mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13,14,15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakann pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual yang ditetapkan dengan PP nomor 71 tahun 2010 menggantikan PP nomor 24 tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP nomor 71 tahun 2010 maka penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual telah mempunyai landasan hukum.Hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP Berbasis Akrual sesuai ketentuan dalam PP nomor 71 tahun 2010 di mana Terdapat 2 buah lampiran, Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri), sedangkan lampiran II merupakan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual hingga tahun 2014. Dengan kata lain, lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP nomor 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari Basis Kas menuju Akrual menjadi Basis Akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaan dalam mengevaluasi kinerja.

 Akuntansi Berbasis Akrual adalah suatu Basis Akuntansi yang transaksi Ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam Laporan Keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam Akuntansi Berbasis Akrual waktu pencatatan *(recording)* sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensip karena seluruh arus sumber daya dicatat. Pengaruh pengakuan akrual dalam Akuntansi Berbasis Kas menuju Akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Keberadaan pos piutang, aset tetap, dan hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarnya informasi operasi atau kegiatan. Dalam Akuntansi Pemerintahan, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus/Defisit.

 Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling baku muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan Keuangan Negara.Hal ini meliputi SDM yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan.Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumberdaya teknologi informasi yang lebih tinggi. Hal ini akan menjadi batu sandungan tersendiri karena ketergantungan penerapan akuntansi selama ini yang mengandalkan jasa konsultan terutama bagi entitas daerah.

# **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian Arlina (2011), bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi akuntansi berbasis akrual pada Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) makasar serta mengetahui faktor-faktor dan nilai-nilai pendukung yang dimiliki oleh KPKNL makasar sehingga mampu menerapkan basis akrual lebih awal. Responden dalam penelitian sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari pegawai KPKNL makasar. Data dikumpulakan melalui proses wawancara langsung dengan para responden menggunakan panduan wawancara, observasi langsung terhadap aktivitas-aktivitas para pegawai KPKNL makasar serta studi dokumentasi atas dokumen-dokumen terkait. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa secara umum pegawai KPKNL Makasar sudah memahami makna akuntansi berbasis akrual, gambaran umum pelaksanaan akuntansi pada KPKNL Makasar yang sangat terbantu dengan adanya system akuntansi berbasis akrual, faktor-faktor yang dimilki untuk mendukung pelaksanaan akuntansi akuntansi berbasis akrual yaitu: komunikasi, sumber daya (sumber daya manusia dan teknologi), sikap/disposisi dan struktur birokrasi, adapun nilai-nilai yang dimiliki untuk menunjang implementasi basis akrual yang lebih awal yaitu: integritas, prosionalisme (akuntabilitas dan komitmen), sinergi, pelayanan (ketulusan dan transparansi), serta kesempurnaan.

Penelitian yang dilakukan Damanik (2011), betujuan untuk menegtahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) pada Pemerintahan Kota Binjai. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal yaitu penelitian yang betujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih. Hasil analisis regresi secara keseluruhan menunjukan R sebesar 0,604 yang berarti bahwa kolerasi/hubungan anatara sumber daya manusia, komitmen dan perangkat pendukung dengan kendala penerapan SAP mempunyai hubungan yang kuat sebesar 60.4%.

Penelitian Sulani (2010) bertujuan untuk, (a) mendapatkan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, yaitu sumber daya manusia, komitmen dan perangkat pendukungnya, (b) mengetahui seberapa besar pengaruh dari sumber daya manusia, komitmen dan perangkat pendukungnya terhadap keberhasilan penerapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, (c) mencoba memberikan saran-saran yang dapat membantu pemerintah kabupaten dalam memecahkan masalh-masalah yang dihadapi khususnya masalah yang diteliti yaitu keberhasilan penerapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang dipengaruhi oleh aspek sumber daya manusia, komitmen dan perangkat pendukungnya. Penelitian skripsi menggunakan desain asosiatif kuasal dan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*. Hasil penelitian menemukan (a) sumber daya manusia, komitmen dan perangkat pendukung mampu menjelaskan keberhasilan penerapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 sebesar 36,5%, (b) sumber daya manusia, komitmen dan perangkat pendukungnya secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, (c) secara parsial, sumber daya manusia dan perangkat pendukung berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sedangkan komitmen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005.

# **rancangan penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif interpretif. Penelitian kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2005:6); Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

Menurut Newman (1997:62), dalam Erna (2008) terdapat tiga pendekatan, yaitu positivism, interpretif, dan kritikal.Ketiganya memiliki tradisi yang berbeda dalam teori sosial dan teknik penelitiannya. Dengan menggunakan paradigm interpretif, kita dapat melihat fenomena dan menggali pengalaman dari objek penelitian.Pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada prespektif dan pengalaman orang yang ditelit­i. Pendekatan interpretif diadopsi dari sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail dengan langsung mengobservasi.

**LOKASI PENELITIAN:** Penetapan lokasi dari suatu penelitian sangat penting dalam rangka pertanggungjawaban data yang diperoleh.Oleh karena itu, lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu.Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian yaitu Kantor Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

**SUMBER DATA:** Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan yaitu data sekunder. Menurut Sugiyono (2005:62). Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.

**TEKNIK PENGUMPULAN DATA:** Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2010:63), terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, diantaranya adalah observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni melakukan survey Lapangan. Survey ini dilakukan secara lebih mendalam dengan cara mengamati secara langsung pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

Kerangka Konseptual Penelitian:

Kebijakan Akuntansi

Penerapan Basis Akrual pada Pemerintahan

Dikeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005

Direvisi dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual

Penerapan Basis Akrual pada Pemerintah Daerah

Penerapan Penuh PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Tahun 2015

# **PEMBAHASAN**

Hasil analisis data yang diperoleh yaitu:

Analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menggunakan kualitatif interpretif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Analisis kualitatif interpretif selain untuk memastikan seberapa siap Kantor DPPKAD dalam menerapkan Standar Akuntansi Berabsis Akrual, namun untuk memastikan seberapa baik sebuah instansi telah patuh terhadap peraturan dan standar yang berlaku.

Peneliti menggunakan Analisis kualitatif interpretif untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman obyek penelitian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual melalui wawancara dan data yang dikumpulkan.

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari wawancara dan dokumentasi bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaa Keuangan Dan Aset Daerah sudah sangat siap dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.Namun masih perlu adanya pembelajaran. Kehadiran Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dinilai sedikit menyulitkan hal tersebut berangkat dari kendala yang dihadapi yaitu SDM, Sistem informasi, Sumber daya Manusia, Strategi dasar yang dapat dipergunakan untuk Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrualyaitu dengan mengandalkan SDM yang memahami regulasi di bidang keuangan daerah dan akutansi. Dimana pengelolaan sumber daya manusia berarti penyiapan dan pelaksanaan suatu rencana yang terkoordinasi untuk menjamin bahwa sumber daya manusia yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, misalnya infrastrukturmenurut (Grigg, 2000) Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, *drainase*, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan sehingga bermanfaat bagi para pengguna dan penilai Akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Secara spesifik, Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan Akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah, dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, maka Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

**Pertumbuhan Ekonomi** Pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya.Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas perkembangan pembangunan, tetapi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo pada Tahun 2014 sebesar 5,53% sedangkan di Tahun 2013 mampu mencapai angka 6,31%. Tingginya tingkat harga paska krisis berakibat produksi dibeberapa sektor ekonomi mengalami stagnasi dan kenaikan produksi yang lamban.Hal ini disebabkan oleh tingkat harga yang tinggi terhadap biaya produksi yang dirasakan oleh unit-unit ekonomi skala menengah ke bawah.

|  |  |
| --- | --- |
| 20 1510Pertumbuhan Ekonomi0 |  |
|  |
|  |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| NASIONAL | 6,35 | 5,28 | 5,9 | 5,02 |
| JATIM | 6,44 | 6,64 | 6,08 | 5,86 |
|   SITUBONDO | 5,38 | 5,43 | 6,31 | 5,53 |

Berdasarkan hasil penelitian dengan rumusan masalah menunjukkan bahwa adanya penambahan pos dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta penambahan jumlah laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Adanya penambahan 3 (tiga) jenis laporan keuangan tersebut, sebenarnya dapat dikatakan pengembangan dari laporan keuangan sebelumnya.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan pengembangan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sedangkan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan pengembangan dari Neraca.Selain itu ada perbedaan dalam pengklasifikasian arus masuk dan arus keluar dalam Laporan Arus Kas (LAK), namun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masih terdapat kesamaan di dalam penyajian laporan keuangan Berbasis Kas Menuju Akrual maupun Berbasis Akrual. Dalam penyajian laporan keuangan terdapat artikulasi antar laporan keuangan yaitu Laporan Operasional (LO) mempunyai artikulasi dengan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca.

PenerapanSAP Berbasis Akrual di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah akan dilaksanakan penuh pada tahun anggaran 2016. Akan tetapi, dalam mengimplementasikan Laporan Keuangan tersebut menemui beberapa kendala, yaitu sistem dan aplikasi yang digunakan, resistensi terhadap perubahan,kurangnya SDM yang berkompeten dan dukungan penuh dari pimpinan.Kendala-kendala tersebut diharapkan adanya pengendalian internal yang memadai agar tercapainya Laporan Keuangan Basis Akrual yang efektif dan efisien dan keandalan pelaporan keuangan. Selain itu dibutuhkan lebih banyak pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya bidang akuntansi pemerintah. Penyusunan kebijakan dan sosialisasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu dilakukan kepada pihak-pihak terkait, sehingga implementasi SAP Berbasis Akrual dapat berjalan dengan baik.

Hubungan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu tentunya dapat dilihat persamaanya dimana semuanya membahas tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Meskipun ada Perbedaan dimana penelitian sebelumnya semuanya membahas mengenai Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang dimana berbeda dengan peneliti yaitu mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, namun penelitian terdahulu dan penelitian saat ini mendasar pada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan hubungan maupun persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, teori dari penelitian ini telah sesuai dengan aturannya. Namun dalam proses Penerapannya tidak sesuai dengan aturan yang digunakan, dimana dalam aturan menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Sedangkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo akan dilaksanakan penuh pada tahun anggaran 2016.

**KESIMPULAN**

Dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.Peraturan Pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kompleksitas Laporan Keuangan merupakan pandangan nyata yang diberikan Pengelola Keuangan Pemerintah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo terhadap AkuntansiPemerintahan Berbasis Akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjadi bertambah kuantitasnya hingga 7 laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo akan dilaksanakan penuh pada tahun anggaran 2016.

Penyajian Laporan Keuangan sebelum Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yakni yang menggunakan Basis Kas menuju Akrual berbeda dengan sesudah diterapkannya aturan tersebut, dimana dalam basis akrual adanya penambahan jumlah laporan keuangan yang disajikan dan penambahan pos-pos dalam Laporan Keuangan. Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo sendiri sudah menyajikan Laporan Keuangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 akan tetapi belum diakrualkan. Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo akan dilaksanakan penuh pada tahun anggaran 2016.

**Saran**

Adapun saran yang dapat diajukan peneliti sebagai hasil dari penelitian ini dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan adalah: 1). Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo lebih mengkaji secara mendalam tentang kebijakan Akuntansi dan sistem Akuntansi dan aplikasi (SIMDA) yang masih dalam Proses pengerjaan ini agar tidak timbul masalah saat Penerapannya. 2). dengan menyusun perencanaan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang akuntansi pemerintahan dengan mengikuti seminar dan pelatihan tentang penerapan SAP Berbasis Akrual khususnya di Pemerintah Daerah. 3). Sekretarian Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo sebaiknya perlu menyiapkan dan menyimpan data-data yang terkait dengan sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan apparat Pemerintah atau Masyarakat agar dapat digunakan sebagai acuan terhadap peneliti-peneliti selanjutnya.

# **DaftarPustaka**

Arliana, Gaybi. 2011. *Implementasi Basis Akrual Pada Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Kajian Fenomenologi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar.* Skripsi. Fakultas Ekonomi danBisnis Universitas Hasanuddin.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta:Erlangga.

Cameron Kim. S, Robert E.Quinn. (1999). *Diagnosing and changing Organizational Culture*. Addison-Wesley Publishing Company,Inc. USA.

Damanik, Citra. 2011. *Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Pemerintah Kota Binjai*.Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Fakhrurazi. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

<http://Fakhrurrazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/>.Diakses tanggal 30 Oktober 2015.

KSAP. 2006. Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual DalamAkuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Bahan Bahasan Untuk LimitedHearing. Jakarta. (<http://ksap.org/memorandum>).

KSAP. 2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.* Makalah disajikan dalam Seminar PentahapanImplementasi SAP Akrual Pemda, Jakarta, 25 Maret.

KSAP. 2011. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menuju Accrual Basis dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian*. Makalah disajikan dalam SeminarNasional Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar,18 Februari.

Luthans, F. 1998. *Organizational Behaviour.* 8th edition. Singapura: McGraw-Hill

Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berjalan 31 Desember 2015 Pemerintah Kabupaten Situbondo *Unaudited BPK RI*

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo. *Tanggal 30 Januari 2014 Nomor 3 Tahun 2014.*

Mahsun Mohammad, Firma Sulistyowati, dan Heribertus A.P. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.

Mangundjaya, Wustari H. 2002. *Mempersiapkan Individu Di Organisasi Untuk Menghadapi Perubahan*.

<http://apioindonesia.files.wordpress.com/>.Diakses tanggal 30 Oktober 2015.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: RemajaRosdakarya.

Mulyana, Budi. 2009. *Penggunaan Akuntansi Akrual di Negara-negara Lain: Tren di Negara-negara Anggota OECD*.

(http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/akuntansi-berbasisakrual.pdf).

Nordiawan Deddi, Iswahyudi Sandi Putra, Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

*Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi*

*Pemerintahan.* 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 33 Tahun 2014. *Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo*

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014. *Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Oeganisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo.*

Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta:Sekolah Pascasarjana UGM.

Robbins, S. P. 2001. *Organizational Behavior: Concept, Controversies, Application.* Edisi 8: Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT IndeksKelompok Gramedia.

Satmoko, Nofan. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sektor Publik.*

(www.iaiglobal.or.id/tentang\_iai\_download.php?id=66&kfile=1).

Shohib, Muhammad. 2010. *Strategi Perubahan Budaya Organisasi*.

http://ms.shohib.staff.umm.ac.id/.

<http://Sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/akuntansi-berbasis-akrualpdf>.

Simanjuntak, Binsar. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia*. Makalah ini disampaikan dalam Kongres XIIkatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 9 Desember.

Sinaga, Jamason. 2005. *Selamat Datang Standar Akuntansi pemerintahan*.

http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art8.pdf.

Siregar, Baldric dan Siregar Bonni. (2001). *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Sobirin, Ahmad. 2005. Privatisasi: Implikasinya terhadap PerubahanPerilakuKaryawan dan Budaya Organisasi. *Edisi Khusus Jurnal Siasat Bisnis on Human Resources,* 19-42.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Zorayapelu.blogspot.com diakses pada tanggal 18 Desember 2015

Sulani, Aldiani. 2010. *Faktor–Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

Tanjung,Abdul Hafiz, 2012, *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual; Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*, Bandung, Alfabeta.

Widjajarso, Bambang. 2009. *Penerapan Basis Akrual pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan.*

Wijaya, Henryanto. 2008. *Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24 Tahun 2005) Untuk Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan dan Akuntabel*. Jurnal Akuntansi/Tahun XII No.3. 313-323

[www.wikiapbn.com](http://www.wikiapbn.com) diakses tanggal 30 oktober 2015

[www.medinamultimitra.com](http://www.medinamultimitra.com) diakses tanggal 30 oktober 2015

Yuwono, C, D, Ino dan Putra Bagus Ani. 2005. *Faktor Emosi Dalam Proses Perubahan Organisasi*. INSAN Vol. 7 No. 3. 250-263